

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berasosiasi dengan pemerintah, terkait dengan penyelenggaraan negara atau keuangan negara. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari alat negara untuk melaksanakan konstitusi dan peraturan perundangan yang ditetapkan. Setiap negara didirikan di atas konstitusi atau undang-undang dasar, yang di dalam konstitusi tersebut ditegaskan tugas dan kewajiban negara terhadap rakyatnya, cita-cita nasional yang hendak diwujudkan, serta aspek-aspek utama penyelenggaraan negara (Mahmudi, 2016).

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Yayasan Sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, oleh karena itu biasanya sektor publik tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya, namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara profesional sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang agar dapat mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan

Pemerintah Daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut berkualitas dan komprehensif.

Aspek yang berpengaruh dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kualitas dan kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia dalam organisasi mempunyai arti yang sangat penting sebagai faktor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi, yang didukung oleh latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah teknologi dan sistem informasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi yang dimaksud adalah program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mampu menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tujuan dari pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah:

1. Menyediakan *database* tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik.
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi.
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Program implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah diimplementasikan adalah SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan. Sistem pengelola

keuangan daerah berbasis teknologi informasi ini dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji kebenarannya sehingga diharapkan dengan diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mampu meningkatkan tingkat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa dari jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 yakni dari 542 Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan LKPD tahun 2016, sebanyak 378 LKPD (70%) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut tingkat pemerintahan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dicapai oleh 31 dari 34 Provinsi (91%), kemudian 275 dari 415 Pemerintah Kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintahan kota (77%) (<http://databoks.katadata.co.id>).

Berbagai faktor menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Faktor tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang belum efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas dan auditabel, serta masih lemahnya sistem penyusunan laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan melalui beberapa dasar pertimbangan, di antaranya adalah kompetensi sumber daya manusia yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan juga

penerapan teknologi atau sistem informasi yang membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik.

BPKAD Kabupaten Bangka merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah menerapkan aplikasi SIMDA. BPKAD Kabupaten Bangka mulai menerapkan aplikasi SIMDA pada Juli 2018. Sebelum menggunakan aplikasi SIMDA, BPKAD Kabupaten Bangka menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Secara umum banyak manfaat yang ditawarkan dari penerapan SIMDA antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah, namun pengimplementasian SIMDA pada BPKAD Kabupaten Bangka juga memiliki kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. SDM yang ada di BPKAD Kabupaten Bangka masih memerlukan penyesuaian dalam penggunaan aplikasi SIMDA, mereka juga masih harus banyak belajar dan memerlukan sosialisasi terkait dengan cara penggunaan aplikasi SIMDA secara baik dan benar. Kendala selanjutnya dalam penerapan aplikasi SIMDA di BPKAD Kabupaten Bangka adalah berkaitan dengan jaringan yang terganggu jika cuaca buruk. Selain itu, sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Bangka tidak semuanya memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka?
2. Apakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu pada Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut, serta dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan kepustakaan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, baik berupa masukan atau pertimbangan terkait

dengan pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari tinjauan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari lokasi peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, pengujian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil (pembuktian hasil hipotesis).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait serta keterbatasan dalam melaksanakan penelitian.